

**PENULISAN SKRIPSI**

**EKSEKUTIF REVIEW DALAM PROSES PENYUSUNAN RAPERDA  
(STUDI KASUS TERHADAP PENARIKAN DRAFT RAPERDA INISIATIF  
DPRD KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PONDOK PESANTREN)**



**Diajukan Oleh:**

**HILARY OLIVIA ANDINI**

**NPM : 190513377**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENULISAN SKRIPSI**

**EKSEKUTIF REVIEW DALAM PROSES PENYUSUNAN RAPERDA  
(STUDI KASUS TERHADAP PENARIKAN DRAFT RAPERDA INISIATIF  
DPRD KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PONDOK PESANTREN)**



**Diajukan oleh:**

**Hilary Olivia Andini**

**NPM : 190513377**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan**

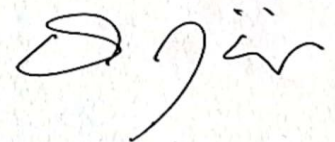
**Dosen Pembimbing**

**Tanggal**

**: 25/5/2023**

**Y. Hartono, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan :**



**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENULISAN SKRIPSI  
EKSEKUTIF REVIEW DALAM PROSES PENYUSUNAN RAPERDA  
(STUDI KASUS TERHADAP PENARIKAN DRAFT RAPERDA INISIATIF  
DPRD KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PONDOK PESANTREN)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan  
Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :  
**Hari : Senin**  
**Tanggal : 19 Juni 2023**  
**Tempat : Ruang Sidang Lt. 2**

**Susunan Tim Penguji:**

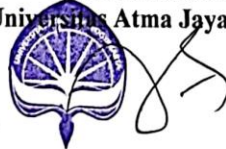
**Ketua : Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo S.H., M.Hum**

**Sekretaris : Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H**

**Anggota : Y. Hartono, S.H., M.Hum**

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Prof. Dr. Anita Christiani S.H., M.Hum**

## **Abstrak**

*Tujuan penulisan hukum dengan judul Eksekutif Review Dalam Proses Penyusunan Terhadap Raperda (studi Kasus Terhadap Penarikan Draft Raperda Inisiatif DPRD Kota Palangka Raya Tentang Pondok Pesantren). Untuk mengetahui bagaimana tinjauan eksekutif review dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pondok pesantren yang ada di kota palangka raya yang pada akhirnya akan menjadi pembatalan atau penarikan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penulisan hukum normative dengan melakukan pengamatan langsung ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya dan mengaitkan kejadian tersebut dengan peraturan tertulis. Di dalam penulisan hukum ini juga menggunakan data primer yang terdiri dari wawancara secara langsung dengan narasumber yang ahli dalam bidangnya yaitu Ketua Badan Pembentukan Praturan Daerah (Bapemperda) dan SubBagian Perundang-Undangan di Kantor DPRD Kota Palangka Raya. Hasil penelitian menyatakan bahwa Eksekutif Review Dalam Proses Penyusunan Terhadap Raperda Pondok Pesantren di Kota Palangka Raya, Kalimantan tengah ini mengalami tumpang tindih dikarenakan adanya peraturan lain yang lebih tinggi tidak bersinkronasi dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren serta Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren.*

**Kata kunci:** *Eksekutif Review, Peyusunan, Raperda, Studi Kasus, Palangka Raya*

### ***Abstract***

*The purpose of this legal writing with the title "Executive Review in the Drafting Process of Regional Regulations (Case Study on the Withdrawal of the Draft Regional Regulation Initiative by the City Council of Palangka Raya Regarding Islamic Boarding Schools)" is to determine how the executive review is conducted in the process of drafting regional regulations concerning Islamic boarding schools in the city of Palangka Raya, which ultimately leads to cancellation or withdrawal. The research methodology used in this legal writing is normative legal writing, which involves direct observation at the Regional People's Representative Council (DPRD) office of Palangka Raya and relating the events to written regulations. This legal writing also utilizes primary data consisting of direct interviews with expert sources in the field, namely the Chairman of the Regional Regulation Formation Agency (Bapemperda) and the Subdivision of Legislation at the Office of the City Council of Palangka Raya. The research findings indicate that the Executive Review in the Drafting Process of Regional Regulations on Islamic Boarding Schools in Palangka Raya, Central Kalimantan, experiences overlapping due to the presence of other higher regulations that are not synchronized with the Minister of Religious Affairs Regulation Number 30 of 2020 concerning the Establishment and Operation of Islamic Boarding Schools, as well as the Minister of Religious Affairs Regulation Number 31 of 2020 concerning Pesantren Education.*

***Keywords:*** *Executive Review, Drafting, Raperda, Case Study, Palangka Raya*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini dengan judul **“Eksekutif Review Dalam Proses Penyusunan Raperda (Studi Kasus Terhadap Penarikan Draft Raperda Inisiatif DPRD Kota Palangka Raya Tentang Pondok Pesantren)”**. Tujuan adanya penyusunan penulisan hukum/skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) pada fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis berharap dengan adanya penulisan hukum/skripsi ini dapat menjadi masukan dan manfaat bagi pemerintah daerah dan DPRD khususnya pemerintah daerah dan DPRD di Kota Palangka Raya dan dapat berguna dalam bidang ilmu hukum khususnya di bidang ilmu hukum kenegaraan dan pemerintahan.

Keberhasilan dan kesuksesan penulisan hukum/skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah turut membantu, membimbing, memberi masukan serta menyemangati saya dalam proses pembuatan penulisan hukum/skripsi tersebut, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Bapa Yosef atas perlindungan, berkat, serta bimbingan dalam Doa Novena 7 hari akhirnya penulisan hukum/skripsi penulis ini melalui hati dan pikirannya dapat menyelesaikan dengan baik.
2. Dr. G. Sri Nurhartanto S.H., LL,M selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan izin dan amanah untuk penulis bersekolah di Universitas Atma Jaya hingga penulis telah menyelesaikan studi.
3. Prof. Dr. Th. Anita Christiani S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang telah memberikan persetujuan dan izin dalam melanjutkan penulisan hukum/skripsi ini sampai akhir.

4. Y. Hartono, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Hukum selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Vina Panduwinata, S.Sos., MAP selaku Ketua Bapemperda Kota Palangka Raya, M. Saiful Mujab, S.Hi., M.H selaku Kepala SubBagian Kajian Perundang-Undangan DPRD Kota Palangka Raya, dan Yustinus Gunihardi, SE., MM selaku Kepala Bagian Fasilitas Pengawasan dan Penganggaran Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya, yang telah meluangkan waktu untuk membantu menjadi Narasumber dalam penelitian/riset penulisan hukum/skripsi ini.
7. Kepada kedua Orang Tua penulis, Bapak Yustinus Gunihardi dan Ibu Ruspeliati yang telah memberikan support lebih, memberikan fasilitas lengkap, dan juga doa restu dalam proses penulisan hukum/skripsi penulis.
8. Kepada Saudara dan Sepupu penulis, Yoga Pratama, Graciela Chelsea, dan Vanessa Christhalia yang telah menghibur penulis serta memberikan dukungan secara langsung dan tidak langsung kepada penulis.
9. Andreana Puspita, S.H, Salma Inas Firdaus, S.H, Vania Rebecca, S.H, Ni Made Regina Febrianti, S.H, Godeliva Fristy, dan Cantika Mahadewi Sasia, S.H yang telah membantu memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan hukum/skripsi.
10. Seluruh Sahabat Penulis di Fakultas Hukum Atma jaya Yogyakarta yaitu: Salma Inaz Firdaus, Andreana Puspita, Luh Indah Lestari, Gedeliva Fristy, Cantika Mhadewi sasia, Bella Calista, Vania Rebecca, dan Ni Made Regina Febrianti yang telah mendukung dan menghibur penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi.

11. Rekan Kerja MoeGyaru yaitu Cece Dessy dan Callista Aspasia Wenthe yang telah mendukung, menghibur, dan menyemangati penulis selama ini.
12. Seluruh Teman & Sahabat penulis yaitu: Reynaldo, Karel, Richardo, Callista, Nata, Anastasya, Adel, Angel, Ajeng, dan seluruh teman dan sahabat yang tidak bias saya sebut satu persatu banyak TerimaKasih telah mendukung, menghibur, serta menyemangati penulis.
13. Kepada mba yang tidak bisa disebutkan namanya terimakasih telah membantu dan menuntun penulis selama berada di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa kemampuan penulis masih jauh dari kata sempurna, hendaknya pembaca memberikan kritik dan saran agar dapat membantu menyempurnakan penulisan hukum/skripsi ini menjadi lebih baik.

Yogtakarta, 19 Juni 2023



Penulis,  
Hilary Olivia Andini



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<i>Abstrak</i> .....	iii
<i>Abstract</i> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	12
1. Peraturan Daerah.....	12
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .....	14
3. Eksekutif Review .....	17

4. Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) .....	18
5. Raperda .....	19
6. Penarikan Raperda .....	20
G. Batasan Konsep.....	21
H. Metode Penelitian .....	23
<b>BAB II</b> .....	<b>27</b>
<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>27</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai <i>Eksekutif Review</i> .....	27
1. Pengertian Eksekutif Review .....	27
2. Objek dan Subjek <i>Eksekutif Review</i> .....	29
B. Tinjauan Studi Kasus Mengenai Penarikan Peraturan Daerah Tentang Pondok Pesantren di Kota Palangka Raya. ....	41
1. Studi Kasus Mengenai Penarikan Peraturan Daerah Tentang Pondok Pesantren di Kota Palangka Raya.....	41
2. Hubungan Penerapan <i>Eksekutif Review</i> Terhadap Rancangan Peraturan Daerah... 43	
C. Tinjauan Mengenai <i>Eksekutif Review</i> Dalam Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pondok Pesantren di Kota Palangka Raya .....	44
1. Hasil Analisis <i>Eksekutif Review</i> Dalam Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pondok Pesantren di Kota Palangka Raya.....	44

2. Mekanisme & Tahapan Penarikan Perancangan Peraturan Daerah yang tertuang di dalam Propemperda. ....	46
3. Dasar Penarikan Suatu Rancangan Peraturan Daerah.....	51
<b>BAB III</b> .....	56
<b>PENUTUP</b> .....	56
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	59